

KESIAPAN SEKOLAH DALAM MENGIMPLEMENTASIKAN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN (KTSP)

Amin Yusuf

Jurusan Pendidikan Luar Sekolah, FIP Unnes

E-mail: yusuf_lemlit@yahoo.com

ABSTRACT

A number of schools in Semarang have been trying to implement the KTSP. However, schools still struggle to understand the curriculum. The government has stated that schools which are ready can implement the KTSP by 2007, and those which are not can postpone the implementation until the end of 2009/2010. A study of the schools' readiness to implement the KTSP was conducted at four schools in Semarang. The research aims at (1) describing the schools' readiness to implement the KTSP; (2) identifying the needs of the school to implement the KTSP; (3) finding out the supporting and inhibiting factors of the KTSP implementation. The readiness to implement the KTSP varied from one school to another. The varieties include several aspects, such as: curriculum properties, facilities, finance, environment, principal's leadership, teachers and staffs' readiness, and parents and students' readiness. It was also revealed that what were needed by the schools to implement the KTSP were commitment and financial support from the government and teachers' understanding of the curriculum through training. The inhibiting factor was inconsistent policy.

Kata Kunci: Kesiapan, Implementasi, dan KTSP

PENDAHULUAN

Pengembangan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) membutuhkan kesiapan bukan saja dari sekolah, melainkan dukungan dari pelbagai pihak, baik orangtua, birokrasi dan administrator pendidikan, serta masyarakat. Oleh karena itu, pengembangan KTSP harus ditangani secara profesional dengan tingkat pemahaman yang baik dalam bidang pendidikan. Akan tetapi, apakah sekolah yang dijadikan basis dalam perubahan dan pengembangan kurikulum sudah siap dalam implementasinya?

Sekolah dituntut untuk profesional dalam menangani segala persoalan pendidikan. Jangan sampai sebagai pelaksana pendidikan, sekolah justru tidak bisa menyelesaikan permasalahannya sendiri. Hal penting untuk segera dilakukan adalah bagaimana menyiapkan sekolah-sekolah agar siap mentransfer perubahan

melalui peranannya sebagai pengembang KTSP. Implementasi kurikulum, khususnya KTSP menuntut partisipasi warga sekolah yakni kepala sekolah, guru, pegawai tata usaha, dan peserta didik, untuk aktif dan kreatif mengembangkan kurikulum yang telah direncanakan sendiri oleh sekolah.

Ketentuan pemerintah menandakan bahwa sekolah-sekolah yang sudah siap, dapat melaksanakan KTSP mulai tahun ajaran 2006/2007, akan tetapi sekolah yang belum siap, harus dilakukan paling lambat tahun ajaran 2009/2010.

Berdasarkan kondisi tersebut perlu diteliti kesiapan sekolah dalam mengimplementasikan KTSP, kebutuhan apa yang dirasakan oleh sekolah dalam mengimplementasikan KTSP dan faktor-faktor apa yang mendukung serta menghambat pelaksanaan KTSP.

Menemukan solusi efektif untuk menyiapkan sekolah-sekolah sehingga

mampu mengembangkan kurikulumnya sendiri adalah manfaat yang ingin dicapai penelitian ini.

M. Basuki Sugita (*Kompas*, 23 September 2006) menyatakan bahwa mulai tahun ajaran 2006/2007, Depdiknas meluncurkan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan KTSP atau akrab disebut kurikulum 2006. Menurutnya, KTSP memberi keleluasaan penuh setiap sekolah untuk mengembangkan kurikulum dengan tetap memperhatikan potensi sekolah dan potensi daerah. Ketua Badan Standar Nasional Pendidikan *BSNP* (*Kompas*, 10 Februari 2006) menegaskan bahwa KTSP merupakan hasil kreasi dari sekolah berdasarkan standar isi dan standar kompetensi. Lebih lanjut dikatakan bahwa terbitnya peraturan menteri tentang standar isi dan standar kompetensi itu menandai diserahkannya kewenangan kepada guru untuk menyusun kurikulum baru. KTSP, tuturnya, akan lebih memberdayakan guru untuk membuat konsep pembelajaran yang membumi sesuai kebutuhan dan kondisi sekolah.

E. Baskoro Poedjinoegroho (*Kompas*, 29 September 2006) menyatakan bahwa kurikulum 2006 yang diperkenalkan dengan istilah KTSP merupakan hasil penegasan dari atau sejalan dengan kebijakan desentralisasi. Ini merupakan sebuah konsep yang indah karena memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada daerah untuk berkembang. Dengan begitu seluruh potensi setempat diharapkan dapat didayagunakan demi pengembangan daerah setempat. Dalam lingkup satuan pendidikan atau sekolah, paradigma yang sama juga ingin diberlakukan, yakni satuan pendidikan yang mandiri dan diberi kesempatan mengerahkan seluruh potensi demi kemajuan pendidikan yang kontekstual, meski harus disadari bahwa hal ini tidak mudah untuk dilaksanakan.

Mendiknas Bambang Sudibyo (*Kompas*, 18 September 2006) menegaskan bahwa tidak ada perubahan drastis dalam

KTSP, yang diolah dan diintrodusir oleh BSNP. Bahkan dalam kurikulum ini guru diberi otonom dalam menjabarkannya, dan murid perannya diposisikan sebagai subyek dalam proses pembelajaran. Dari situlah implementasi KTSP dapat memenuhi standar evaluasi pembelajaran siswa.

Prasetyo Utomo (*Kompas*, 24 April 2006) menengarai bahwa keuntungan yang bisa diraih guru dalam KTSP adalah keleluasaan memilih bahan ajar dan peserta didik diharapkan dapat mengembangkan potensinya sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan minatnya. Guru dapat memusatkan perhatian pada pengembangan potensi peserta didik dengan menyediakan aneka ragam kegiatan belajar mengajar dan sumber belajar. Guru diharapkan lebih mandiri dan leluasa dalam menentukan bahan ajar sesuai dengan kondisi lingkungan sekolah dan kemampuan peserta didiknya. Sekolah dipacu untuk dapat menyusun program pendidikan sesuai dengan keadaan peserta didik dan sumber belajar yang tersedia.

Dalam KTSP terdapat empat komponen, yaitu (1) tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan, (2) struktur dan muatan, (3) kalender pendidikan, dan (4) silabus serta rencana pelaksanaan pengajaran (RPP).

Tujuan pendidikan tingkat satuan pendidikan mengacu pada tujuan umum tiap jenjang pendidikan. Untuk (1) pendidikan dasar, adalah meletakkan dasar kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri dan mengikuti pendidikan lebih lanjut; (2) pendidikan menengah, adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri, dan mengikuti pendidikan lebih lanjut, dan (3) pendidikan menengah kejuruan adalah meningkatkan kecerdasan, pengetahuan, kepribadian, akhlak mulia, serta keterampilan untuk hidup mandiri, dan

mengikuti pendidikan lebih lanjut sesuai dengan kejuruannya.

Struktur kurikulum tingkat satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah tertuang dalam standar isi yang dikembangkan dari mata pelajaran (1) agama dan akhlak mulia, (2) kewarganegaraan dan kepribadian, (3) ilmu pengetahuan dan teknologi, (4) estetika, dan (5) mata pelajaran jasmani, olah raga dan kesehatan. Kelompok mata pelajaran itu dilaksanakan melalui muatan dan/atau kegiatan pembelajaran sebagaimana yang tertuang dalam PP No. 19 tahun 2005 tentang standar nasional pendidikan pasal 7. Muatan KTSP meliputi sejumlah mata pelajaran yang keluasan dan kedalamannya merupakan beban belajar bagi peserta didik pada satuan pendidikan. Di samping itu materi *muatan lokal* dan kegiatan *pengembangan diri* termasuk ke dalam isi kurikulum.

Kalender pendidikan dapat disusun oleh tiap satuan pendidikan sesuai dengan kebutuhan daerah, karakteristik sekolah, kebutuhan peserta didik dan masyarakat, dengan memperhatikan kalender pendidikan sebagaimana yang tercantum dalam standar isi.

Silabus merupakan penjabaran standar kompetensi dan kompetensi dasar ke dalam materi pokok, kegiatan pembelajaran, dan indikator pencapaian kompetensi untuk penilaian, alokasi waktu, dan sumber belajar. Silabus dikembangkan oleh guru kelas/mata pelajaran, kelompok guru kelas/mata pelajaran, kelompok kerja guru (PKG/MGMP) atau dinas pendidikan. Silabus harus dikembangkan berdasarkan prinsip-prinsip: ilmiah, relevansi, sistematis, konsisten, memadai, fleksibel, dan menyeluruh.

RPP, adalah rancangan mata pelajaran per unit yang akan diterapkan oleh guru dalam pembelajaran di kelas. Berdasarkan RPP inilah seorang guru diharapkan dapat menerapkan pembelajaran secara terprogram. Oleh sebab itu, RPP

harus mempunyai daya terap (*aplicable*) yang tinggi. Pada sisi yang lain melalui RPP pun dapat diketahui kadar kemampuan guru dalam menjalankan profesinya.

Implementasi merupakan penerapan suatu ide, konsep, kebijakan atau inovasi dalam suatu tindakan praktis sehingga memberikan dampak, baik berupa pengetahuan tambahan, keterampilan maupun nilai, dan sikap. Implementasi kurikulum dapat didefinisikan sebagai suatu proses penerapan ide, konsep, dan kebijakan kurikulum dalam suatu aktivitas pembelajaran sehingga peserta didik menguasai seperangkat kompetensi tertentu sebagai hasil interaksi dengan lingkungan.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikemukakan bahwa implementasi kurikulum adalah operasional konsep kurikulum yang masih bersifat potensial menjadi aktual dalam bentuk pembelajaran. Mulyasa (2006:34) mengungkapkan bahwa implementasi kurikulum sedikitnya dipengaruhi oleh tiga faktor, yaitu: (1) karakteristik kurikulum yang mencakup ruang lingkup ide baru suatu kurikulum dan kejelasan bagi pengguna di sekolah; (2) strategi implementasi yaitu strategi yang digunakan dalam implementasi, dan (3) karakteristik pengguna kurikulum yang meliputi pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap guru terhadap kurikulum serta kemampuannya untuk merencanakan kurikulum dalam pembelajaran.

Mengimplementasikan suatu program baru di sekolah tidak akan lepas dari kendala atau rintangan-rintangan. Oleh karena itu, untuk meminimalkan adanya kendala dalam proses implementasi tersebut perlu adanya persiapan-persiapan yang harus dilakukan oleh sekolah. Sukmadinata (1997) menyatakan bahwa kendala-kendala dalam proses implementasi kurikulum adalah: (1) tidak adanya keseragaman, oleh karena itu untuk daerah dan situasi yang memerlukan keseragaman dan persatuan atau kesatuan nasional, (2) tidak adanya standar penilaian yang sama, sehingga

sukar untuk memperbandingkan keadaan dan kemajuan suatu sekolah dengan sekolah lain, (3) sukar melakukan pengelolaan dan penilaian secara nasional, (4) belum semua sekolah memiliki kesiapan untuk menyusun dan mengembangkan kurikulum sendiri.

METODE

Pendekatan yang digunakan adalah penelitian kualitatif. Dengan pendekatan kualitatif, diharapkan dapat diperoleh informasi yang mendalam. Meskipun sampel penelitian yang dipakai amat kecil, namun karena representatif, diharapkan hasilnya dapat mengeksplorasi informasi secara mendalam. Penelitian ini difokuskan untuk mengetahui kesiapan sekolah-sekolah dalam mengimplementasikan KTSP, dengan tiga fokus kajian, yaitu (1) kesiapan materiil dan nonmateriil, (2) kebutuhan sekolah dalam mengimplementasikan KTSP, dan (3) aspek pendukung serta penghambatnya.

Populasi penelitian mencakup sekolah SMP/SMA yang terdapat di kota Semarang, khususnya sekolah negeri. Teknik sampling yang digunakan yaitu *purposive sampling*, dengan diarahkan pada pengambilan sampel berdasar pada pencapaian tujuan penelitian.

Berdasar alasan dan pertimbangan di atas, ada empat sekolah yang dijadikan sampel penelitian, yaitu dua sekolah masing-masing SMP N 24 dan SMA N 12, mewakili sekolah-sekolah negeri yang letaknya di pinggiran kota, tapi dalam suasana lingkungan pedesaan dan dua sekolah lagi, yaitu SMP N 21 dan SMA N 4, sama-sama sekolah pinggiran tapi dalam konteks suasana perkotaan.

Pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, sedangkan alat yang dipakai untuk pengumpulan data adalah pedoman wawancara. Data atau informasi yang akan dihimpun yaitu informasi tentang kesiapan sekolah dalam menerapkan KTSP. Data itu didapat dari guru, kepala sekolah, siswa, orangtua, dan perwakilan komite sekolah.

Untuk memberikan makna atas data yang telah terkumpul, maka dilakukan analisis penelitian deskriptif kualitatif, yaitu dalam bentuk pemaparan hasil wawancara mendalam, melalui model bagan alir.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dari empat sekolah contoh yang diteliti, masing-masing menunjukkan karakteristik yang berbeda. Pada SMPN 21, desain program KTSP dibuat oleh tim khusus yang ditunjuk oleh kepala sekolah. Tim ini oleh kepala sekolah selalu diberi kesempatan untuk menghadiri acara sosialisasi, seminar, dan pelatihan-pelatihan yang berhubungan dengan KTSP. Di SMAN 4 yang letaknya tidak jauh dari sekolah yang pertama, ada sedikit perbedaan dalam pelaksanaan KTSP. Jika dilihat dari aspek perangkat kurikulum, sekolah ini tampaknya belum terlalu siap dalam penerapan KTSP. Kemampuan guru dalam memahami struktur kurikulum, mengembangkan tujuan pembelajaran, penerapan metode belajar-mengajar, menyusun tata urutan penyajian materi dan alokasi waktu, mengembangkan cara evaluasi, pemanfaatan sumber-sumber belajar, dan pemahaman terhadap pedoman pelaksanaan KTSP, tampaknya masih belum memadai. Di SMP N 24, satuan pendidikan yang terletak berbatasan dengan kota Ungaran, KTSP tampak belum sepenuhnya berjalan. Di sekolah ini kurikulum KBK bahkan masih dipakai. Hal ini terlihat dari sebagian buku yang digunakan oleh siswa. Buku-buku yang digunakan siswa kelas 8 dan kelas 9 menggunakan kurikulum *KBK*, sedangkan untuk siswa kelas 7, semuanya sudah KTSP. Lain lagi dengan SMAN 12. Sekolah yang terletak di Gunungpati ini memiliki suasana lekat dengan pedesaan. Di sekolah ini untuk mengimplementasikan KTSP tampaknya masih butuh waktu. Sebenarnya jika dilihat dari usia para guru, tampak bahwa hampir 80 persen terdiri dari generasi muda. Artinya dengan semakin

banyak suatu sekolah itu memiliki guru dari generasi muda, sebenarnya akan lebih cepat dalam mengadopsi suatu perubahan. Namun kenyataan yang terjadi sebaliknya. Jika dilihat dari pemahaman guru terhadap struktur KTSP, terlihat mereka menguasai, hanya saja memang belum terdokumentasi oleh sekolah secara rapi.

Sarana dan prasarana sekolah yang dikelola dengan baik dapat memberikan kontribusi yang optimal pada jalannya proses pendidikan di sekolah. Hasil observasi peneliti pada empat sekolah contoh menunjukkan satu sekolah lebih menonjol, yaitu SMPN 21, sedang 3 sekolah contoh lainnya yaitu SMAN 4, SMPN 24, dan SMAN 12 relatif sama. Pada sekolah contoh pertama, bangunan fisik (gedung) tampak lebih baru, terawat, dan terkesan modern. Ruang kelas dengan jumlah, ukuran, sirkulasi udara, kebersihan, dan *whiteboard*, peralatan informasi teknologi terlihat pada sekolah contoh pertama. Laboratorium sains, komputer, bahasa, dan aula untuk pentas seni juga dimiliki. Akses jalan masuk ke sekolah, juga amat bagus karena berada di pinggir jalan besar. Kelemahan tampak pada tidak dimilikinya halaman atau lapangan tempat olahraga dan kegiatan seperti upacara. Pada tiga sekolah contoh yang telah diobservasi, SMAN 4 jika dilihat dari lokasi, jumlah kelas, ukuran ruang, sirkulasi udara, laboratorium, aula, perpustakaan memang semua dimiliki, tetapi terkesan tidak begitu ideal, kurang terjaga kebersihannya, dan banyak alat yang tidak berfungsi, karena kurang perawatan. SMPN 24, karena nuansanya di pedesaan, tampak luar gedung relatif lebih asri. Di sekolah ini meski fasilitas yang dimiliki tidak terkesan baru dan modern tetapi terjaga perawatannya dengan baik. Kursi siswa, mebel kantor, peralatan yang ada di ruang laboratorium, perpustakaan, terlihat cukup rapi dan bersih. Kekhasan sekolah ini adalah antar ruang dihubungkan dengan koridor dengan dihiasi taman yang indah dipandang. Pada

SMAN 12 meski lokasinya lebih bernuansa desa, bahkan jika kita berdiri di depan sekolah juga tampak gunung Ungaran yang menghijau, tetapi di sekolah ini pengelolaan sarana dan prasarana tampak kurang terjaga kebersihan, keindahan, dan kerapiannya. Antar bangunan atau kelas terlalu dekat, sehingga terkesan pengap. Dinding ruang terkesan banyak yang kotor, apalagi kalau hujan, lantai sering terlihat banyak tanah merah yang tidak dibersihkan. Jumlah kelas, laboratorium, teknologi informasi, masih membutuhkan persiapan yang lebih baik.

Sumber keuangan yang dimiliki suatu sekolah dapat peneliti kelompokkan menjadi tiga, yaitu (1) pemerintah, (2) orangtua atau peserta didik, dan (3) masyarakat. Pada empat sekolah contoh yang diteliti, karena semuanya merupakan sekolah negeri, sumber pemasukan sekolah relatif sama. Bedanya terletak pada besaran masing-masing sumber yang dapat diraih. Dari empat sekolah contoh yang diteliti, semuanya mendapat sumber anggaran dari pemerintah, yaitu dari APBD kota, dan Blok Grant seperti Bos, Unit Kelas Baru, Unit Gedung Baru, dan Program-program Pusat lainnya. Dari kecepatan mengakses sumber keuangan, secara berurutan yaitu SMPN 21, SMAN 4, SMPN 24, dan SMAN 12. Besaran sumber yang amat besar yaitu dari bantuan orangtua ketika tahun ajaran baru, di mana SMPN 21 dan SMAN 4 mematok sumbangan yang relatif tinggi bila dibandingkan dua sekolah contoh yang lain.

Jika dilihat dari aspek perencanaan pengelolaan keuangan, tampak bahwa sekolah contoh pertama dan kedua kesiapannya lebih bagus bila dibandingkan dengan dua sekolah contoh yang lain. Kedua sekolah contoh, melakukan perencanaan keuangannya dengan melibatkan seluruh komponen sekolah, di samping anggota dewan guru, komite sekolah, dan beberapa wakasek maupun kepala sekolah. Peneliti mengamati bahwa di kalangan guru tidak muncul prasangka

tentang pengelolaan keuangan, karena di samping dilaksanakan sesuai dengan rencana, pengelolaan keuangannya pun relatif agak transparan. Di dua sekolah contoh yang lain juga sebenarnya dalam hal pengelolaan keuangan sama-sama transparan, akan tetapi, karena dananya tidak begitu besar, ditambah dengan perencanaan yang barangkali prosesnya kurang bagus atau kurang begitu banyak melibatkan komponen sekolah, sehingga dukungan dan respon pun tidak begitu maksimal.

Dimensi lingkungan, dapat peneliti bedakan menjadi dua, yaitu lingkungan fisik dan lingkungan sosial. Dilihat dari dimensi lingkungan fisik sekolah, ke empat sekolah contoh yang diteliti secara berurutan kesiapannya yaitu: (1) SMPN 21, (2) SMPN 24, (3) SMAN 4, dan (4) SMAN 12. Ke empat sekolah tersebut letaknya di pinggir jalan besar, sehingga dari sisi lokasi dan akses transportasi ada kemudahan bagi para siswa, orangtua atau masyarakat pengguna. Bedanya, dua sekolah contoh itu berada di daerah kota, sedangkan dua sekolah contoh lainnya berada pada perbatasan dengan nuansa pedesaan. Bangunan fisik ke empat sekolah tergolong masih memadai, kecuali SMP 21 yang tampak lebih baru dan modern. Suasana untuk proses belajarmengajar pun ke empat sekolah masih tergolong cukup ideal, karena suasana tidak terlalu bising dan gaduh, sehingga suasana belajar pun dapat berjalan dengan tenang dan lancar.

Dimensi lingkungan sosial, menyangkut sistem nilai budaya, kebiasaan yang terjadi dalam masyarakat sekitar sekolah, dan kepercayaan masyarakat terhadap kehadiran sekolah. Apakah kehadiran suatu sekolah dinilai tinggi oleh masyarakatnya, mungkin karena banyak memberikan manfaat? Apakah sistem nilai sosial-budaya yang dibangun oleh sekolah dapat terinternalisasi ke dalam masyarakat, sehingga sekolah dapat menjadi bagian dari kehidupan masyarakatnya? Berdasarkan

penilaian itu, yang paling memiliki potensi kesiapan yaitu SMAN 12, SMPN 21, SMAN 4, dan SMPN 24. Mengapa SMAN 12, karena sekolah ini berada di wilayah pedesaan. Partisipasi orangtua maupun masyarakat desa terhadap pelbagai aktifitas yang dilakukan oleh sekolah amat baik. Sekolah ini mampu mengembangkan prinsip-prinsip interaksi sosial dengan baik. SMPN 24, meski juga sama-sama berlokasi di pedesaan, akan tetapi lokasinya agak jauh dari pemukiman, sehingga proses interaksi dan transformasi sistem nilai sosial budaya antara sekolah dan masyarakat tidak terjadi dengan baik. Untuk dua sekolah contoh lainnya, yaitu SMPN 21 dan SMAN 4, ditinjau dari lingkungan sosialnya meski sebenarnya juga bagus, tapi tidak sebaik yang terjadi pada sekolah yang ada di desa. Relasi sosial yang dibangun antara komunitas kota dengan sekolah umumnya didasarkan atas kepentingan ekonomi, dan bukan karena sentuhan emosi dan perasaan. Tingkat kepeduliannya pun sebatas kepentingan pribadi dan bukan kepentingan sosial.

Untuk melihat apakah kepemimpinan kepala sekolah berlangsung dengan baik demensinya dapat dilihat dari kepemimpinan dalam pelaksanaan administrasi, membina tenaga kependidikan, pendayagunaan sarana dan prasarana, serta bagaimana kepemimpinan sebagai manajer dan supervisor. Jika dimensi itu yang dilihat, maka SMPN 21 berada pada kesiapan yang paling bagus, kemudian disusul SMAN 4, SMAN 12, dan SMPN 24. Di SMPN 21 sistim administrasi berjalan amat bagus, buku-buku, semacam buku informasi, desain program kurikulum, silabus hingga RPP masing-masing guru tersusun dengan rapi. Di SMAN 4 pun juga sistim administrasi berjalan cukup baik, akan tetapi tampilannya tidak sebagus SMPN 21. Di SMPN 24 dan SMAN 12, sistim administrasi masih belum tertangani dengan baik. Masih banyak data-data lama yang belum diperbaiki, sementara itu jika

suatu ketika dibutuhkan salah satu data, maka tidak dapat ditemukan dalam waktu yang cepat. Dimensi kepemimpinan lainnya, yaitu pembinaan tenaga kependidikan, menunjukkan bahwa ke empat sekolah contoh menunjukkan hasil yang relatif sama. Artinya bahwa di empat sekolah tersebut para kepala sekolahnya memberi dukungan kepada guru untuk meningkatkan karir, baik menyertakan guru dalam kegiatan seminar maupun memberi kesempatan untuk studi lanjut ke jenjang yang lebih tinggi. Dilihat dari pendayagunaan sarana dan prasarana, misalnya penerapan prinsip efisiensi penggunaan kelas, perawatan fasilitas yang telah dimiliki, optimalisasi fungsi sarana dan prasarana yang dimiliki, secara berurutan kesiapannya adalah SMPN 21, SMAN 4, SMPN 24, dan SMAN 12.

Kesiapan guru menghadapi implementasi KTSP dapat dilihat dari keseharian guru dalam melakukan pekerjaannya di sekolah. Di SMPN 21 dan SMAN 4 tampak terjadi perubahan cara mengajar guru yang cukup signifikan, terutama pada kelas-kelas imersi. Di kelas ini guru sudah cenderung tidak lagi menggunakan ceramah, walaupun masih, tapi dibantu dengan penggunaan IT, baik tugas-tugas *download* di internet maupun tugas lainnya. Demikian juga yang terjadi di SMAN 4, meski tidak dipersiapkan secara khusus seperti di SMPN 21, akan tetapi banyak guru muda sudah mulai meninggalkan metode ceramah. Hal ini berbeda dengan apa yang terjadi di dua sekolah contoh lainnya, yaitu SMPN 24 dan SMAN 12. Guru-guru di dua sekolah ini, tampaknya juga telah terjadi perubahan cara mengajar. Meskipun metode ceramah itu yang paling disukai oleh kebanyakan guru, tapi untuk memenuhi tuntutan silabus dan RPP yang telah dibuatnya sendiri, guru harus menyesuaikan untuk mengubah cara mengajar, sesuai dengan kebutuhan cara belajar siswa. Perubahan lain yang bisa diamati di kalangan para guru terkait

dengan kesiapan implementasi KTSP yaitu cara yang dilakukan guru dalam memberikan tugas kepada siswa, misalnya pemberian tugas yang beda untuk setiap siswa atau setidaknya tugas berdasarkan kelompok, persiapan materi ajar yang selalu dimodifikasi menjadi materi yang terbaru, prosedur penilaian yang bervariasi, dan penciptaan suasana belajar yang menyenangkan. Meskipun dimensi-dimensi perubahan ini belum terwujud di empat sekolah contoh yang diteliti, tapi perubahan sikap guru, pendekatan terhadap siswa, persiapan materi ajar, dan kesiapan guru untuk melakukan suatu perubahan diri terlihat cukup direspon dengan baik di empat sekolah contoh.

Dari dimensi karyawan, implementasi KTSP juga menuntut kesiapan karyawan untuk mengoptimalkan peranannya dalam melaksanakan tugas-tugas administrasi, melaksanakan tugas-tugas pengelolaan perpustakaan, menangani layanan administrasi kesiswaan, dan penciptaan iklim kerja yang kondusif. Berdasarkan dimensi-dimensi tersebut, observasi di empat sekolah contoh menunjukkan bahwa di kalangan karyawan, umumnya memiliki etos kerja dan performan yang belum optimal. Hampir dapat ditemui di seluruh sekolah contoh bahwa mereka bekerja sangat rutin, dan jarang mengembangkan kreatifitas dan inovasi.

Muara implementasi KTSP akan tercermin pada perubahan sikap dan perilaku siswa setelah segala sesuatunya juga berubah. Perubahan itu antara lain kreatifitas, daya inovasi, sikap kompetitif, sikap mandiri, dan sikap memiliki terhadap sesuatu program sekolah. Di empat sekolah contoh yang diteliti, ada dua sekolah yang perubahan sikap dan perilaku siswanya amat menonjol, yaitu pada siswa-siswi di SMPN 21 dan SMAN 4. Di dua sekolah ini, siswanya tampak lebih disiplin, serius dalam belajar, kompetitif dalam berprestasi, aktif dalam berkegiatan ekstra-kurikuler, giat dalam berprestasi akademik maupun

kegiatan non-akademik, seperti olah raga, kesenian, puisi dan drama, lomba olimpiade sains, dan siswa teladan. Pada dua sekolah contoh lain, yaitu SMPN 24 dan SMAN 12, sebetulnya juga mengalami dinamika perubahan, akan tetapi kecepatan perubahan itu memang tidak seperti dua sekolah contoh yang disebut pertama.

Akhirnya, implementasi KTSP juga amat ditentukan oleh perantara orangtua. Apakah kesadaran orangtua terhadap perkembangan belajar putra-putrinya muncul? Apakah kalangan orangtua turut berpartisipasi dalam pemberian fasilitas belajar putra-putrinya? Apakah orangtua turut peduli dalam pemecahan pelbagai problem yang dihadapi oleh sekolah? Dari empat sekolah contoh yang diteliti, tampaknya hampir semua orangtua memiliki kepedulian terhadap perkembangan belajar putra-putrinya. Perbedaan antara sekolah contoh yang satu dengan yang lain terletak pada tingkat kepedulian dan partisipasi yang ditunjukkan. Mungkin karena lebih *well educated*, orangtua pada tiga sekolah contoh, yaitu SMPN 21, SMAN 4, dan SMPN 24 terlihat tingkat kepeduliannya lebih tinggi bila dibanding satu sekolah contoh lainnya, yaitu SMPN 12.

Sebagian besar kepala sekolah mengutarakan bahwa untuk sukses dalam penerapan KTSP, yang paling penting adalah komitmen dari pemerintah. Jika prinsip KTSP itu memberi kewenangan yang lebih kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulumnya sendiri berdasar potensi dan karakter satuan atau sekolah masing-masing, maka seyogyanya etatisme atau campur tangan pemerintah pusat, termasuk BNSP tidak boleh terjadi. Justru yang amat dibutuhkan sekolah-sekolah adalah pemahaman melalui pelatihan-pelatihan yang intens dan berkesinambungan, serta dukungan dana, baik dari pusat maupun daerah seoptimal mungkin. Jangan sampai terjadi ketika pusat mendengungkan suatu perubahan,

tetapi setelah sampai di tingkat bawah atau satuan pendidikan kehabisan energi lantaran dana yang ada sudah terserap di tingkat pusat, sedang di tingkat bawah sama seperti teori *trickel down effect*, menunggu tetesan air dari talang.

Kebutuhan yang dirasakan oleh empat kepala sekolah contoh adalah kebijakan yang konsisten, supaya yang berada pada tingkat satuan pendidikan tidak merasa terombang-ambing oleh kebijakan yang selalu berubah-ubah. Mereka memberikan contoh bahwa buku yang dipakai hingga kini ada yang menggunakan kurikulum KBK, dan ada pula yang sudah berpedoman pada KTSP. Yang menjadi faktor pendukung dilaksanakannya KTSP di sekolah menurut kepala sekolah dari empat sekolah contoh yang diteliti yaitu komitmen seluruh komponen sekolah untuk melaksanakannya. Guru, Karyawan, komite sekolah, siswa maupun para orangtua, serta kepala sekolah harus bersatu padu, bahu membahu untuk mewujudkannya. Oleh sebab itu, dibutuhkan dukungan kepala sekolah dalam menjalankan sistem manajemen yang bertanggungjawab dan unggul. Faktor pendukung lain tentu adanya kesiapan, baik kesiapan materiil maupun non-materiil sekolah.

Yang menjadi faktor penghambat kegiatan implementasi KTSP di sekolah yaitu apabila komitmen kepala sekolah kurang, mereka tidak mampu memotivasi dan menggerakkan komponen sekolah lainnya. Kurangnya transparansi keuangan, pemahaman bersama terhadap KTSP, dukungan orangtua, juga dapat menjadi penghambat pelaksanaan KTSP di sekolah.

Hasil observasi di sejumlah sekolah contoh menunjukkan bahwa kesulitan yang bakal dirasakan dalam penerapan KTSP jika suatu sekolah belum pernah mengintrodusir kurikulum KBK. Salah seorang kepala sekolah menyatakan, sudah mendapatkan penjelasan terkait dengan implementasi KTSP. Begitu pun sejumlah guru dan kepala sekolah contoh lainnya

yang ditemui secara terpisah. Informasinya, di kota Semarang implementasi KTSP dimulai tahun ajaran 2007, akan tetapi, di sekolah ini sebagian mata pelajaran masih menggunakan kurikulum 2004.

Perangkat kurikulum merupakan sarana penunjang dalam pencapaian keberhasilan kegiatan pembelajaran yang harus dimiliki oleh seorang guru. Dalam mempersiapkan struktur KTSP pemahaman guru-guru di empat sekolah contoh yang diteliti tampaknya juga telah terjadi, meski antara sekolah satu dengan lainnya kadar pemahamannya berbeda-beda. Untuk itu setiap guru dituntut untuk menyiapkan dan merencanakan sebaik-baiknya dalam rangka mencapai keberhasilan kegiatan pembelajaran secara optimal (Depdiknas, 2005).

Sarana dan prasarana sekolah sebagai satu faktor kesiapan yang cukup penting dalam implementasi KTSP, tampak juga telah mulai dilakukan di sekolah-sekolah contoh yang diteliti. Bahkan di SMPN 21 dan SMAN 4, manajemen sekolah dengan fokus perhatian yang tinggi telah melakukan pembenahan secara nyata. Mulyasa (2006) mengatakan bahwa manajemen sarana dan prasarana yang baik diharapkan dapat menciptakan sekolah yang bersih, rapi, dan indah, sehingga mampu menciptakan kondisi yang menyenangkan, baik bagi guru maupun murid untuk berada di sekolah. Di samping itu pula diharapkan tersedianya alat-alat atau fasilitas belajar yang memadai secara kuantitatif maupun kualitatif serta relevan dengan kebutuhan dan dapat dimanfaatkan secara optimal untuk kepentingan proses pendidikan dan pengajaran, baik oleh guru sebagai pengajar maupun murid sebagai pelajar.

Pengelolaan sumber daya keuangan sekolah merupakan dimensi kesiapan sekolah yang amat penting dalam implementasi KTSP. Chon (Nanang, 2000) menyatakan bahwa biaya pendidikan meliputi biaya langsung dan biaya tidak langsung. Biaya langsung terdiri dari biaya-

biaya yang dikeluarkan untuk keperluan pelaksanaan pembelajaran, sarana belajar, biaya transportasi, gaji guru baik yang dikeluarkan oleh pemerintah, sekolah maupun orangtua. Sedangkan biaya tidak langsung berupa keuntungan yang hilang (*earning forgone*) dalam bentuk biaya kesempatan yang hilang (*opportunity cost*) yang dikorbankan siswa selama belajar. Biaya langsung yang dikeluarkan oleh empat sekolah contoh meningkat dari waktu ke waktu. Hal ini dikarenakan semakin meningkatnya sarana dan prasarana belajar yang harus dimiliki oleh sekolah. Dengan begitu sekolah menarik sumbangan dari orangtua makin besar (Mulyasa, 2006).

Kepemimpinan kepala sekolah dalam mengarahkan dan mendayagunakan sumber daya yang tersedia sangat menentukan keberhasilan pelaksanaan KTSP. Di empat sekolah contoh yang diteliti, banyak guru-guru yang sedang studi lanjut ke S2, mereka juga sering mendapat kesempatan untuk mengikuti seminar dan pelatihan dengan diambatkan biaya dari sekolah. Hal ini menunjukkan bahwa kepala sekolah turut serta dalam mendorong peningkatan karir dan kinerja guru. Joko Susilo (2007) menegaskan bahwa untuk mewujudkan keberhasilan proses pendidikan di sekolah, kepala sekolah harus berperan dalam mengendalikan keberhasilan kegiatan pendidikan, meningkatkan pelaksanaan administrasi sekolah sesuai dengan tujuan dan komitmen bersama, meningkatkan keterlaksanaan tugas tenaga kependidikan sesuai tujuan pendidikan, dan mengatur secara profesional pendayagunaan serta pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan.

Guru dan karyawan juga punya peranan yang sangat penting, karena siswa tidak mungkin belajar sendiri tanpa bimbingan dari guru yang mampu mengemban tugasnya dengan baik. Adapun karyawan juga punya peran membantu guru dan kepala sekolah dalam menangani tugas-tugas administrasi sekolah, baik itu

perpustakaan, kesiswaan, atau administrasi kepegawaian sekolah. Dalam konteks ini, peranan guru pada empat sekolah contoh yang diteliti relatif bagus. Dalam mengajar mereka juga sudah mulai mengurangi kebiasaan menggunakan metode ceramah, pendekatan terhadap siswa juga tidak selalu klasikal, akan tetapi dapat individu maupun kelompok, guru tampak mulai berinovasi dalam pengembangan materi ajar, dan guru juga mulai menunjukkan cara mengajar yang menyenangkan, tentunya sesuai dengan cara dan gaya siswa dalam belajar. Di kalangan karyawan juga tampak terjadi kekompakan dalam bekerja, kerja sama, dan suasana iklim kondusif terus terjaga.

Siswa merupakan bagian penting dalam implementasi KTSP, oleh karenanya agar tidak terjadi keruwetan dalam melaksanakan kegiatan pengajaran, perlu diadakan penelaahan tentang siswa. Siswa dituntut mampu berpartisipasi dalam menjabarkan dan mengimplementasikan aspek-aspek kurikulum yang mendukung terbentuknya suatu profil lulusan sebagaimana terumuskan dalam KTSP. Setiap siswa dituntut memiliki kemampuan (1) kreatif dan inovatif dalam belajar, (2) menciptakan suasana kompetitif dalam belajar, (3) menghargai dan menghormati setiap warga sekolah, (4) mengikuti berbagai perubahan *IPTEKS* yang sedang terjadi, dan (5) rasa memiliki yang tinggi terhadap program sekolah. Jika dilihat dari lima parameter tersebut, maka siswa-siswi di empat sekolah contoh yang diteliti, memang telah mengalami perubahan sikap, perilaku, dan performa seperti itu. Tingkat kompetisi untuk meraih prestasi akademik terasa amat ketat. Berbagai tambahan belajar, privat, dan tentir dilakukan. Orangtua pun sepenuhnya mendukung siswa. Motivasi untuk membawa nama besar sekolah melalui lomba-lomba olimpiade, kesenian, olah raga, dan kegiatan lainnya juga menunjukkan rasa memiliki yang tinggi terhadap program sekolah. Anik (2005) mengingatkan bahwa

siswa merupakan pihak yang akan menerima dan memperoleh seperangkat kemampuan yang terumuskan dalam KTSP. Oleh karenanya perlu diposisikan sebagai subyek implementasi kurikulum, sehingga kurikulum bukan diperuntukkan bagi guru, akan tetapi diperuntukkan bagi siswa.

Orangtua turut bertanggungjawab atas kesuksesan program sekolah, termasuk dalam implementasi kurikulum. Artinya keberhasilan sekolah sangat ditentukan oleh seberapa jauh tingkat partisipasi orangtua terhadap implementasi program-program yang diselenggarakan oleh sekolah. Anik (2005) dalam satu penelitiannya pernah menyimpulkan bahwa ada korelasi antara kemajuan dan kualitas sekolah dengan tingkat kesadaran orangtua terhadap pendidikan anaknya.

SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat disimpulkan (1) kesiapan sekolah dalam implementasi KTSP mencakup kesiapan materiil dan kesiapan non-materiil. Kesiapan materiil meliputi perangkat kurikulum, di mana secara berurutan tingkat kesiapan masing-masing sekolah contoh adalah: SMP N 21, SMAN 4, SMPN 24, dan SMAN 12; Kesiapan sarana dan prasarana, tingkat kesiapan masing-masing sekolah contoh, adalah SMPN 21, SMPN 24, SMAN 4 dan SMAN 12; Kesiapan keuangan sekolah, tingkat kesiapan masing-masing sekolah contoh, adalah SMPN 21, SMAN 4, SMPN 24, dan SMAN 12; Kesiapan lingkungan sekolah, tingkat kesiapan masing-masing sekolah contoh, adalah SMPN 21, SMPN 24, SMAN 4, dan SMAN 12. Kesiapan materiil meliputi kepemimpinan kepala sekolah di mana, secara berurutan tingkat kesiapan masing-masing sekolah contoh SMPN 21, SMAN 4, SMAN 12, dan SMPN 24; Kesiapan guru dan karyawan tingkat kesiapan masing-masing sekolah contoh, adalah SMAN 4, SMPN 21, SMPN 24, dan SMAN 12; Kesiapan siswa dan orangtua

tingkat kesiapan masing-masing sekolah contoh, adalah SMPN 21, SMAN 4, SMPN 24, dan SMAN 12, (2) Jika prinsip KTSP itu memberi kewenangan yang lebih kepada sekolah untuk mengembangkan kurikulumnya sendiri berdasar potensi dan karakter satuan atau sekolah masing-masing, maka seyogyanya *etatisme* atau campur tangan pemerintah pusat, termasuk BNSP tidak boleh terjadi. Justru yang amat dibutuhkan sekolah-sekolah adalah pemahaman melalui pelatihan-pelatihan yang intens dan berkesinambungan, serta dukungan dana, baik dari pusat maupun daerah seoptimal mungkin. Jangan sampai terjadi ketika pusat mendengungkan suatu perubahan, tetapi setelah sampai di tingkat bawah atau satuan pendidikan kehabisan energi lantaran dana yang ada sudah terserap di tingkat pusat, sedang di tingkat bawah sama seperti teori *trickel down effect*, menunggu tetesan air dari talang; dan (3) Faktor pendukung yang amat dirasakan oleh sekolah dalam mempersiapkan implementasi KTSP adalah kegiatan pelatihan yang dilakukan di sekolah secara berkesinambungan, sedangkan faktor penghambatnya adalah masih digunakannya kurikulum 2004, serta kebijakan dan komitmen yang berubah-ubah, baik pada tingkat pusat maupun pemerintahan provinsi.

Berdasarkan simpulan di atas, saran yang dapat dirumuskan adalah (1) diperlukan kegiatan supervisi dan monitoring yang sangat serius oleh dinas pendidikan kota, jika perlu Walikota turun ke sekolah-sekolah agar masing-masing sekolah dapat mempersiapkannya lebih terpola, dengan kecepatan yang relatif tinggi, dan dengan hasil yang bagus, (2) pemerintah seyogyanya memerdekakan sekolah sekolah untuk bereksperimen dan berinovasi secara kreatif untuk

mengimplementasikan KTSP sesuai potensi dan karakteristik masing-masing sekolah secara eksplisit; dan (3) diperlukan pendampingan oleh Perguruan Tinggi atau LSM untuk meningkatkan pemahaman dan kemampuan anggota sekolah melalui pelatihan-pelatihan secara berkelanjutan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anik Gufron. 2005. *Kurikulum Berbasis Kompetensi: Kajian Kritis, Implementasi, dan Implikasi*. Jurnal Pendidikan. Volume 1 No.6/Th.III 2 Maret 2005. Yogyakarta: Universitas Negeri Yogyakarta.
- BNSP. (2006). *Panduan Penyusunan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Dasar dan Menengah*. Jakarta.
- Manshur Muslich. (2007). *KTSP, Dasar Pemahaman dan Pengembangan*. Malang: Bumi Aksara.
- Mohammad Joko Susilo. (2007). *KTSP, Manajemen Pelaksanaan dan Kesiapan Sekolah Menyongsongnya*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Mulyasa. (2006). *Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan*. Bandung: Rosdakarya.
- Nanang Fattah. 2000. *Ekonomi dan Pembiayaan*. Bandung: Rosdakarya.
- Nana Syaodih Sukmadinata. (2000) *Pengembangan Kurikulum Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya..
- Oemar Hamalik. (2006). *Manajemen Kurikulum*. Rosdakarya. Bandung.
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang: *Standar Nasional Pendidikan*. Jakarta.
- UUSPN Nomor 20 Tahun 2003. *Sistem Pendidikan Nasional*. Jakarta: Restindi Mediatama.